

e-ISSN: 2656-8330

# POLA KOMUNIKASI HUMAS BNNP RIAU DAN LSM DALAM MENYOSIALISASIKAN BAHAYA NARKOBA

# <sup>1</sup>Annisa Ika Ratri, <sup>2</sup>Hayatullah Kurniadi

1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: annisaika80@gmail

#### **ABSTRAK**

Semakin tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMA menjadikan humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan sosialisasi untuk mengedukasi mereka mengenai bahaya narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menyosialisasikan bahaya narkoba pada siswa SMA di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pola komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat merujuk kepada satu tujuan yang sama, yakni menjalankan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan sosialisasi, kedua lembaga memerlukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dalam kedua lembaga ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau cenderung memegang kendali atas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, pola komunikasi yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menyosialisasikan bahaya narkoba pada siswa SMA menggunakan komunikasi formal dan komunikasi pengendalian dengan pola primer, sekunder, dan sirkular dengan pola jaringan roda/ bintang.

Kata kunci: pola komunikasi, humas, lembaga swadaya masyarakat, sosialisasi

#### **ABSTRACT**

The increasing level of drug abuse among high school students makes the public relations of the National Narcotics Agency of Riau Province in collaboration with non-governmental organizations in implementing programs to prevent, eradicate the misuse and illegal circulation of narcotics and socialization to educate them about the dangers of drugs. The purpose of this study is to find out the public relations communication pattern of the National Narcotics Agency of Riau Province in socializing the dangers of drugs in high school students in Riau Province. The research method used in this study is qualitative descriptive method. The communication pattern conducted by the public relations of the National Narcotics Agency of Riau Province and non-governmental organizations refers to one common goal, namely to carry out programs to prevent, eradicate the misuse and illegal circulation of narcotics. In carrying out socialization, both institutions require communication. Communication conducted in these two institutions, the National Narcotics Agency of Riau Province tends to be in control of communication and socialization conducted. Thus, it can be concluded, communication patterns used by both institutions in socializing the dangers of drugs in high school students using formal communication and control communication with primary, secondary, and circular patterns with wheel / star network patterns.

**Keywords:** communication patterns, public relations, non-governmental organizations, socialization

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

#### Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 300 juta orang. Pasar internasional menargetkan Indonesia menjadi ruang operasi perdagangan narkoba karena dianggap menjanjikan. Semenjak beberapa waktu terakhir, pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama dari yang awalnya hanya sebagai negara transit hingga akhirnya berdagang narkoba (Nizarlin dan Fachrurrazi, 2016). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan status Indonesia yang menjadi pasar utama narkoba yang terkonsentrasi pada generasi penerus yang mana merupakan remaja. Penyebaran narkoba juga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sudah semakin sulit untuk dicegah (Pratiwi, 2018).

Terdapat beberapa kota/provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona merah penyebaran narkoba, salah satunya adalah Riau. Berdasarkan letak geografisnya, Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikannya sebagai wilayah strategis bagi pengedar narkoba untuk menyebarkan narkotika di Riau. Hal ini termasuk dalam indikator penolaian bahwa Riau termasuk dalam posisi 5 besar penyebaran narkoba (Haluan, 2020).

Kepala kesbangpol Riau, Chairul Rizki menyatakan banyak oknum negara tetangga yang mengambil kesempatan menjadikan Riau sebagai sasaran empuk untuk menyelundupkan barang haram ini. Terutama ke wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, seperti Rupat, Bengkalis, dan beberapa wilayah lainnya. Melihat semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan siswa SMA yang berada di provinsi Riau, maka peran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Lembaga Anti Narkotika, Gerakan Anti Narkotika Nasional, dan Forum Organisasi Anti Narkotika, yang bekerjasama dalam proses sosialisasi bahaya narkoba pada kalangan siswa SMA di Provinsi Riau harus lebih ditingkatkan dan semakin digalakkan.

Badan Narkotika Nasional (BNNP) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki dasar hukum Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol (Badan Narkotika Nasional Indonesia, 2019). Badan Narkotika Nasional tidak hanya berada di pemerintahan pusat, melainkan setiap daerah juga mempunyai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan juga Kota.

Lembaga swadaya masyarakat merupakan lembaga atau organisasi non-provit yang didirikan dengan berbasis gerakan moral dan berperan dalam penyelenggaraan organisasi (Setiono, 2003). Lembaga swadaya masyarakat merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk ditujukan kepada organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan tidak berorientasi pada profit serta tidak terikat dengan organisasi negara. Jeff Atkinson dan Martin Scurrah dalam "Globalizing Social Justice; The Role of Non-Govermental Organizations in Bringing About Social Change" mengatakan bahwa LSM sebagai suatu kelompok masyarakat dalam bentuk perhimpunan yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan (Tri Jata Ayu Pramesti, 2020.).

Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secaa terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya (Waluya, 2014). Humas adalah seseorang yang memberikan pengaruh besar untuk perubahan, karena humas merupakan wadah bagi berbagai keahlian, sehingga mampu mendukung fungsi dan tujuan manajemen, rencana jangka panjang, dan mampu menjembatani interaksi internal maupun eksternal instansi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari peranan humas yang merupakan salah satu bagian penting dalam organisasi dan berperan kompleks

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

dalam menyampaikan infoemasi dan edukasi serta mengubah masyarakat secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwaperan humas bukan terbatas pada perencanaan saja, melainkan juga memecahkan masalah, termasuk dalam hal ini adalah masalah penyebaran narkoba yang semakin marak pada kalangan siswa SMA yang berada di Provinsi Riau.

Sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tidak serta merta dilakukan sepenuhnya oleh humas Badan Narkotika Nasional, melainkan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Dengan begitu, jangkauan dari pelaksanaan sosialisasi dan juga persebaran informasi lebih efektif. Sosialisasi juga diperlukan agar terciptanya suasana kondusif dan menurunkan tingkat kecanduan narkoba pada kalangan siswa SMA yang mana mereka merupakan korban dari narkoba. Sehingga, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berdampak pada menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba yang terjadi di masyarakat terutama pada kalangan siswa SMA.

Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi untuk menyosialisasikan bahaya narkoba selalu berkoordinasi satu sama lainnya. Seluruh informasi yang berkaitan dengan penyebaran indormasi narkoba disampaikan humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, begitu pula sebaliknya, seluruh informasi terkait pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat akan disampaikan/dilaporkan kepada humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Sebelum melaksanakan sosialisasi, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat akan melakukan audiensi atau mengirimkan surat pengajuan untuk melakukan sosisalisasi yang kemudian juga akan mengundang humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat memerlukan komunikasi. Komunikasi yang digunakan oleh kedua lembaga dalam pelaksanaan sosialisasi adalah komunikasi organisasi. Seperti yang diketahui, komunikasi adalah sebuah tindakan dalam bertukar informasi, ide, maupun pendapat dari setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi dengan tujuan yang sama. Komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah komunikasi organisasi. Dalam komunikasi ini, pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi di dalamnya, seperti penyampaian informasi dari pimpinan kepada anggota begitu pula sebaliknya, yang memungkinkan tercapainya tujuan organisasi (Bungin, 2006).

Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang mendudukkan diri pada kepentingan bersama, melakukan interaksi dan kerjasama yang teratur sehingga mencapai tujuan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi keterbatasan kemampuan anggota masing-masing (Sugandha, 1996). Devito (1997: 337) menjelaskan organisasi sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi dari tiga atau empat sampai dengan ribuan anggota. Organisasi mempunyai struktur secara formal maupun informal. Tujuan umum dari organisasi adalah meningkatkan pendapatan, namun juga terdapat tujuan khusus dari masing-masing anggota organisasi.

Komunikasi organisasi merupakan sebuah kegiatan menunjuk dan menafsirkan pesan dari berbagai unit komunikasi dan merupakan bagian dari organisasi atau instansi dalam berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi dalam sebuah lingkungan (Wayne, pace, dan Faules, 2006). Wiranto menyatakan komunikasi organisasi adalah mengirim dan menerima pesan dalam kelompok formal maupun kelompok informal dalam sebuah organisasi. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang diakui oleh organisasi dan berorientasi pada organisasi dan berisi cara-cara kerja dalam organisasi, produktifitas, dan

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

berbagai pekerjaan yang perlu dilakukan dalam organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang sering dilakukan dan diakui secara sosial (Khomsarial, 2011).

Komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan dan saling bertukar pesan dan hubungan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, baik secara formal dan informal untuk mengatasi lingkungan yang selalu berubah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, t.t.). Adapun bentuk komunikasi organisasi adalah Persuasif, Pengendalian, Informatif, dan Integratif.

Dalam komunikasi organisasi, biasanya akan digunakan komunikasi verbal yang dilakukan antara individu secara langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung, komunikasi verbal dilakukan dengan berkomunikasi, sedangkan secara tidak langsung, komunikasi dilakukan dalam bentuk surat maupun memo. Dalam komunikasi verbal, ide atau gagasan akan dapat tersampaikan dengan baik karena lebih mudah dipahami. Kemudian, komunikasi nonverbal yang merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggerakkan bagian tubuh, simbol atau isyarat, kontak mata, emosi, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal ini tidak efektif digunakan dalam komunikasi organisasi karena sulit mendapatkan ide ataupun gagasan dari pesan yang disampaikan (Arni, 2009).

J.A Devito mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi secara formal maupun informal dalam organisasi. Komunikasi dormal merupakan komunikasi yang secara sah disetujui organisasi tersebut dan berorientasi kepada organisasi, sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang disetujui oleh sosial dalam organisasi dan tidak berorientasi sepenuhnya dalam organisasi, melainkan kepada anggota dari organisasi itu sendiri (Hamali dan Budihastuti, 2019).

Dalam komunikasi terdapat pola komunikasi yang mendukung kegiatan komunikasi. Pola komunikasi merupakan gabungan dari 2 kalimat, yakni, pola dan komunikasi. Pola mempunyai arti, bentuk, cara kerja, sistem, maupun struktur yang tetap (Poerwadarminta, 1976). Sedangkan komunikasi adalah kalimat yang diadopsi dari bahasa inggris communication yang berasal dari bahasa latin communis, yang berarti "sama makna", yang menunjukkan adanya proses bertukar informasi dari seseorang kepada orang lainnya(Onong Uchjana effendy, 2003). Dalam diskursus etnografi komunikasi, pola komunikasi dinyatakan sebagai bentuk interaksi yang menggunakan kode bahasa yang mempunyai kekhasan berulang antar komponen dan mempengaruhi aspek linguistik, interaksi sosial, dan budaya (Haryono, 2005).

Devito (2007) menyebutkan macam-macam pola komunikasi. Pola komunikasi primer yang merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol verbal maupun nonverbal. Lambang verbal dalam komunikasi primer ini berupa bahasa atau penyampaian pesan secara lisan yang disampaikan oleh komunikator dan secara langsung mengunkapkan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan lambang nonverbal merupakan lambang yang dihunakan dalam berkomunikasi selain dari bahasa dan perkataan langsung, melainkan simbol yang menggunakan anggota tubuh sebagai media pendukung dari komunikasi verbal (Cangara, 2006).

Pola komunikasi sekunder merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media lain setelah menggunakan media utama. Pola komunikasi sekunder ini biasa dilakukan pada saat melakukan kegiatan dengan jumlah sasaran yang banyak. Dalam pola komunikasi sekunder ini, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan menggunakan alat sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertamanya, ini digunakan oleh komunikator untuk menjadikan sasaran komunikasi yang lebih luas jangkauannya dan juga dalam jumlah yang lebuh banyak. Sifat dari komunikasi

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

sekunder ini adalah semakin lama semakin efektif dan efisien karena memiliki teknologi informasi yang semakin canggih untuk media pendukungnya (Cangara, 2006).

Pola komunikasi linear merupakan komunikasi yang dapat berlangsung secara tatap muka, dan pesan di dalam komunikasi ini berperan sebagai titik pusat. Linear dalam pola komunikasi ini memiliki arti lurus yang menjadikan komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan akan berkalan dari satu titik kepada titik lainnya secara garis lurus. Hal ini menjadikan penyampaian pesan oleh komunikator dan komunikan menjadi pusatnya, sehingga dalam komunikasi ini pesan yang akan disampaikan akan efektif dengan melakukan perencanaan sebelum melakukan komunikasi (Cangara, 2006).

Pola komunikasi sirkular merupakan pola komunikasi yang dapat dilakukan secara terus menerus karena dalam komunikasi ini feedback menjadi kunci utama keberhasulan pesan yang disampaikan (DeVito, 2007). Dalam pola ini, komunikasi yang dilakuakn akan mendapatkan feedback dari komunikan langsung kepada komunikator sebagai penentu penting dalam keberhasilan komunikasi. Dallam pola komunikasi ini, proses komunikasi yang berlangsung akan terus berputar dan feedback langsung antara komunikator dan komunikan (Somba, Warouw, dan Mandey, 2017).

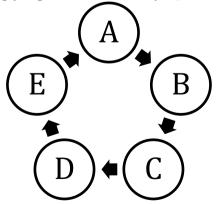
Pola komunikasi adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi dan perilaku dari berbagai kalangan yang memilki latar belakang sosial yang berbeda untuk menyampaikan pesan dan menciptakan sebuah harapan baru dalam publiknya. Ada beberapa jaringan pola komunikasi menurut para ahli sebagai berikut:

Jaringan rantai. Dalam pola komunikasi, jaringan rantai merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh anggota dalam proses menyampaikan pesan (Lailah, 2013).



Gambar 1. Pola komunikasi rantai (Widjaja, 2000)

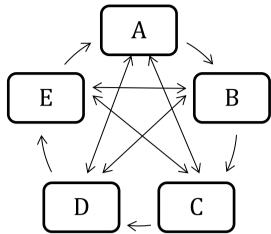
Jaringan lingkaran, merupakan jaringan yang kedudukan anggotanya sama dan dapat saling berkomunikasi dengan orang yang berada di dekatnya (Aw, 2010).



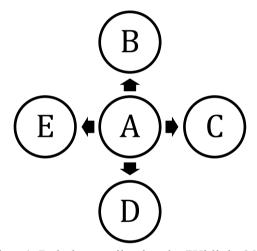
Gambar 2. Pola komunikasi lingkaran(Widjaja, 2000)

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

Jaringan roda / bintang, merupakan jaringan paling kompleks yang setiap anggotanya memiliki kesempatan untuk saling berkomunikasi dan mendapatkan feedback langsung (Komunikasi, 2019).



Gambar 3. Pola komunikasi bintang(Widjaja 2000)



Gambar 4. Pola komunikasi roda (Widjaja 2000)

Menurut Widjaja, terdaat tahapan dalam pola komunikasi, yakni komunikasi satu tahap, yang mana komunikasi yang dilakukan dengan mengirimkan langsung pesan kepada penerima pesan sehingga memungkinkan komunikasi satu arah. Komunikasi dua tahap, yakni komunikasi yang proses penyampaian pesannya dilakukan melalui orang-orang tertentu dan kemudian diteruskan kepada penerima pesan. Dan terakhir, komunikasi banyak tahap, yaitu komunikasi yang proses penyampaian pesan dilakukan dengan banyak cara agar tidak monoton.

#### Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan dengan mengumpulkan data secara mendalam dan menjelaskan hasil secara mendalam pula. Penelitian ini mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*Depth Interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan humas Badan Narkotika Nasional provinsi Riau dan kepada masing-masing lembaga swadaya masyarakat. Observasi dilakukan dengan meninjau / melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga/instansi. Penelitian juga dilakukan dengan

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

mengumpulkan dokumentasi baik dari pihak humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan melalui media sosial masing-masing lembaga / instansi. Analisis data menggunakan analisis data Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi dan kesimpulan (Suwendra, 2018).

#### Hasil dan Pembahasan

## Analisis pola komunikasi yang dilakukan antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam sebuah lembaga atau organisasi, komunikasi menjadi salah satu bagian penting untuk saling bertukar informasi. Pentingnya komunikasi bukan hanya secara personal, melainkan pada komunikasi dalam organisasi. Menjalin komunikasi yang baik dalam organisasi akan terbentuk pula komunikasi yang berjalan dengan lancar untuk mencapai keberhasilan organisasi (Lumentut, Pantow, dan Waleleng 2017).

Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat merujuk kepada satu tujuan yang sama, yakni menjalankan program P4GN. Setiap anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Dengan begitu, untuk kegiatan yang yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dapat dievaluasi oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Informasi yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kepada siswa SMA maupun masyarakat dievaluasi dan dikendalikan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Begitu pula dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki materi yang akan disampaikan kepada siswa SMA yang berada di wilayah provinsi Riau akan diperiksa dan dievaluasi sebelum disebarluaskan. Hal ini dilakukan dengan tujuan, agar informasi yang disampaikan kepada siswa SMA maupun masyarakat adalah informasi yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

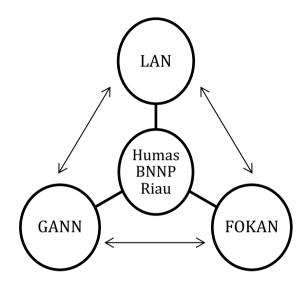
Komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah komunikasi integrasi. Hal ini dapat dilihat ketika humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan program P4GN. Program P4GN adalah program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program inilah yang disebarluaskan melalui sosialisasi agar siswa SMA mengerti akan bahaya narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan komunikasi tidak selalu dalam pertemuan langsung atau audiensi saja, melainkan juga menggunakan media sosial whatsapp grup. Selain itu, dalam proses komunikasi yang berlangsung antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan secara komunikasi formal. Komunikasi formal sendiri adalah komunikasi yang berlangsung secara terorganisir sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dan seluruh informasi berorientasi kepada organiasi. Komunikasi yang terjadi antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan lembaga Swadaya Masyarakat juga dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak terputus pada satu waktu saja.

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat, terdapat pola dalam pelaksanaan komunikasi diantara kedua lembaga dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya.

Sesuai dengan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, pola komunikasi yang terjadi diantara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah pola komunikasi roda/ bintang. Pola tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Pola komunikasi roda/ bintang.

Komunikasi roda/ bintang dalam komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat terjadi ketika ketua, pengurus, dan anggota dari masing-masing lembaga dapat saling bertukar informasi di dalam pertemuan maupun di luar pertemuan dan saling berpartisipasi sehingga mendapatkan feedback langsung yang dapat mencapai tujuan bersama.

Sosialisasi adalah suatu usaha dalam diri seseorang untuk belajar mengenal, memahami, dan menghargai norma pemasyarakatan dan menjadi bagian dari masyarakat (Online, 2020). Di sisi lain, Sutaryo (2004) mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses perkenalan sistem kepada seseorang serta menentukan respon yang dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitar individu tersebut (Gischa, 2020).

Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan sosialiasi dalam rangka menjalankan program P4GN pada lingkungan siswa SMA di Provinsi Riau adalah bagian dari pencegahan penyalahgunaan kasus narkoba di Provinsi Riau.

Kegiatan sosialisasi ini biasanya tidak hanya melalui sosialisasi langsung di sekolah-sekolah, melainkan juga menggunakan media sosial, media cetak, media elektronik, dan juga media luar ruang. Banyaknya kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat berbeda-beda dalam satu tahunnya.

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

Dalam satu tahun, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan sosialisasi sebanyak 23 paket yang terbagi menjadi sosialisasi melalui media online, media cetak, media elektronik, media luar ruang, pojok informasi, branding sarana publik, dan bekerja sama dengan provider operator. Sedangkan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam satu tahun melakukan sosialisasi sebanyak 12 sampai 48 kali. Setiap Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki target dan program kerja masing-masing dalam melaksanakan sosialisasi.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga melaksanakan program pelatihan, pembekalan, dan pembinaan tentang program P4GN. Pelatihan ini dilaksanakan secara bertahap bagi masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat karena pelatihan ini tidak hanya dikhususkan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, melainkan juga kepada instansi pemerintah maupun swasta yang berada di wilayah Provinsi Riau.

Sebelum melaksanakan sosialisasi biasanya Lembaga Swadaya Masyarakat akan mengirimkan surat kepada humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengikuti format yang sudah ditetapkan. Kemudian, setelah disetujui, Lembaga Swadaya Masyarakat akan melaksanakan sosialisasi kepada siswa SMA yang sudah ditunjuk oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau beserta tanggal yang sudah ditetapkan. Materi yang akan disampaikan dalam sosialiasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan dievaluasi terlebih dahulu oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Jika ada materi yang kurang akan ditambahkan dan materi yang berlebihan akan dihapuskan agar tidak membuat kerancuan dalam penyebaran informasi kepada siswa SMA.

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi berbeda-beda. Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan persiapan mulai dari waktu 1 minggu sampai kepada satu bulan. Jika pelaksanaan sosialisasi dilakukan menggunakan media elektronik (radio dan televisi lokal), maka diperlukan lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya. Untuk perisapan sosialisasi melalui radio dan televisi, diperlukan kesepakatan dalam pelaksanaannya, untuk melakukan kontrak, materi, dan jenis sosialisasi yang akan dilakukan. Selain itu, anggaran pelaksanaan sosialisasi juga harus diperhitungkan dalam setiap kegiatan.

Lembaga Swadaya Masyarakat mempersiapkan sosialisasi membutuhkan waktu 1 minggu sampai satu bulan. Untuk melaksanakan sosialisasi ini, Lembaga Swadaya Masyarakat akan berkonsultasi lebih lanjut kepada humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengenai materi yang akan mereka sampaikan.

Dalam 4 tahun terakhir, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau mengalami penurunan. Pada tahun 2015, Riau masuk dalam posisi 5 besar wilayah darurat narkoba. Pada tahun 2019, Riau masuk dalam urutan ke-21. Penurunan ini secara angka tidak terlalu jauh karena pertumbuhan penduduk dari tahun-tahun sebelumnya juga meningkat.

Dalam wawancara bersama dengan Dina F. Lubis, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat bukan untuk memberantas pengguna narkoba secara langsung dalam waktu bersamaan, melainkan membuat orang lain sadar akan bahaya narkoba. Sosialisasi yang dilakukan ditargetkan kepada siswa SMA dan juga masyarakat yang awam akan bahaya

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

narkoba dan dampak hukum yang akan menjerat mereka apabila menggunakan narkoba (Dina Fitriana Lubis, 2020).

Sosialisasi dilakukan agar siswa SMA maupun masyarakat dapat mengetahui gejala dan perilaku pengguna narkoba, selain itu juga menanamkan sikap anti kepada siswa SMA kepada narkoba. Dengan terbentuknya sikap anti, perlahan akan tumbuh kesadaran agar membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba (Sefianus Zei, 2020). Setelah pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan siswa SMA dapat menjadi penyuluh bagi dirinya dan keluarga masing-masing agar menghindari narkoba dan melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba.

Hambatan yang terjadi saat melaksanakan sosialiasi adalah terbatasnya biaya bagi masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk melaksanakan sosialisasi kepada siswa SMA. Sementara itu, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan sosialisasi, karena pada saat sekarang ini sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, melainkan bisa menggunakan media sosial dan media elektronik lainnya yang dapat diukur datanya.

Lebih lanjut, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa yang sulit dalam melaksanakan sosialisasi adalah mengubah pola pikir masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah merasakan pengaruh narkoba. Orang-orang yang sudah tersugesti menggunakan narkoba ini akan sulit dirubah terutama apabila lingkungan mendukung mereka. Orang-orang cenderung menganggap bahwa menggunakan narkoba adalah aib, sehingga mereka enggan untuk melaporkan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat bukan untuk menghapuskan pengguna narkoba, melainkan menyadarkan dan mengajak masyarakat terutama siswa SMA agar menjahi narkoba dan menanamkan sikap anti terhadap narkoba. Peran serta masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya menjadi faktor penting, karena dengan kerjasama dari berbagai pihak yang bersangkutan akan memberikan dampak yang positif pula terhadap sosialisasi yang dilakukan.

Dalam sebuah organisasi, ada banyak bentuk komunikasi yang digunakan. Bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat ada 4 jenisnya, yakni bentuk komunikasi persuasif, komunikasi pengendalian, komunikasi informatif, dan komunikasi integratif.

Komunikasi persuasif dalam sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah dengan memberikan contoh dan mengajak siswa agar menjauhi narkoba. Secara persuasif, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sering melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengajak melakukan hal positif dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Beberapa kegiatan diantaranya adalah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan, lomba poster, dan banyak lagi yang lainnya.

Komunikasi pengendalian dalam komunikasi yang berlangsung antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih cenderung dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Setiap kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat akan dilakukan evaluasi oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

oleh masing-masing Lembaga Swadaya Masyrakat sejalan dengan informasi yang akan disampaikan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Sosialisasi yang akan disampaikan kepada siswa SMA terkait bahaya narkoba harus benar-benar informasi yang benar. Jika informasi yang disampaikan kepada siswa SMA yang pada dasarnya masih remaja yang sedang mencari jati diri tidak sesuai ataupun menimbulkan rasa penasaran bagi siswa SMA, ini akan berdampak kepada sosialisasi yang dilakukan justru akan membuat siswa ingin mencoba, bukan menjauhi narkoba.

Pengendalian oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ini dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi dan juga setelah sosialisasi. Jika sebelum sosialisasi, pengendalian yang dilakukan adalah evaluasi materi dan jadwal pelaksanaan sosialisasi masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, maka pengendalian setelah sosialisasi adalah evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta evaluasi laporan kegiatan.

Komunikasi informatif yang dilakukan oleh humas Badan Narotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat biasanya berjalan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Setiap informasi yang humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sampaikan terkait sosialisasi ataupun informasi lainnya akan disampaikan kepada masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat. Informasi inilah yang nantinya akan disampaikan juga kepada siswa SMA yang berada di Provinsi Riau dan juga kepada masyarakat saat pelaksanaan sosialisasi. Setiap Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan komunikasi dalam bentuk informatif kepada masyarakat, terutama kepada siswa SMA.

Dalam komunikasi integratif, ini biasanya dilakukan oleh seluruh anggota dari kedua lembaga, baik humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena, komunikasi yang dilakukan kedua lembaga ini berlangsung terus menerus dan saling menyatukan antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk bekerja sama dalam menjalankan program P4GN.

Berdasarkan dengan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh huams Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau cenderung memegang penuh bentuk komunikasi yang sudah disebutkan sebelumnya.

Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau merupakan pusat dari komunikasi yang dilakukan anatara kedua lembaga. Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga mengendalikan seluruh informasi yang akan disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam sosialisasi. Hal ini menjadikan komunikasi yang terjadi antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat terintegrasi antara satu lembaga dan lembaga lainnya.

Disamping itu, terdapat pola komunikasi yang terbentuk dalam komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yakni pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular.

Pada dasarnya, setiap komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah pola komunikasi primer yang diiringi dengan pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi sirkular.

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

Hal ini dapat terlihat pada saat pelaksanaan komunikasi, pola komunikasi primer yang merupakan komunikasi dengan menyampaikan pesan secara verbal dan nonverbal untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi primer ini diiringi dengan pola komunikasi sekunder yang merupakan komunikasi menggunakan media lain selain komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam hal ini, komunikasi sekunder dilakukan dengan menggunakan media whatsapp grup yang dibentuk oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Sedangkan untuk pola komunikasi sirkular yang dilakukan terus menerus oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat berlangsung terus menerus karena komunikasi ini merupakan kunci keberhasilan komunikasi antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang terjadi antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah pola komunikasi primer, sekunder, dan sirkular.

### Analisis alur permohonan sosialisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan sosialisasi memiliki aturan dalam pengajuannya. Aturan ini berlaku bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat umum, maupun instansi lainnya saat akan melaksanakan sosialisasi kepada khalayak umum, termasuk siswa SMA di Provinsi Riau.

Dalam pengajuan waktu pelaksanaan sosialisasi, pihak yang mengajukan permohonan harus mengikuti alur permohonan sosialisasi seperti yang sudah digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 6. Alur permohonan sosialisasi (sumber: Kantor BNNP Riau)

Pemohon harus mengisi hari / tanggal pelaksanaan, jam, tempat / lokasi pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi, tema, dan nomor telepon koordinator yang dapat dihubungi untuk saling berkoordinasi.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan melaksanakan sosialisasi ini harus mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dengan mengajukan waktu, tempat, dan tema sosialisasi, ini akan ditinjau terlebih dahulu oleh pihak

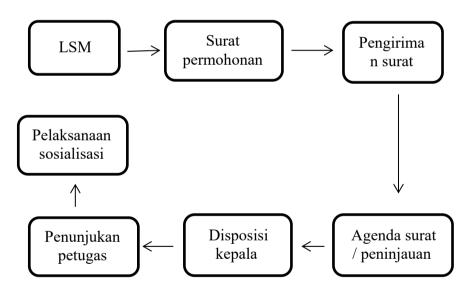
Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau apakah pada lokasi yang sama sudah pernah dilakukan sosialisasi dan tema apa yang sudah dilakukan penyosialisasian di lokasi tersebut. Apabila pada lokasi yang sama, namun tema yang akan disampaikan berbeda, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau akan memberikan izin untuk melaksanakan sosialisasi di lokasi tersebut.

Tema yang akan disampaikan dalam sosialisasi juga tidak lepas dari evaluasi oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, hal ini bertujuan untuk mengendalikan informasi yang akan disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai narkoba. Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan bahwa, Informasi yang disampaikan mengenai narkoba harus benar, karena informasi ini menentukan pola pikir siswa SMA mengenai narkoba, jika informasi yang disampaikan sedikit saja melenceng, bisa menyebabkan kegagalan dalam pemahaman dan menyebabkan siswa menjadi tertarik dengan narkoba. Inilah tujuan pengevaluasian dari tema yang akan disampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peninjauan mengenai lokasi, waktu, tema, dan peserta ini dilakukan setelah surat masuk ke agenda Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kemudian mendapatkan disposisi dan penunjukan petugas dari kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau barulah pelaksanaan sosialisasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dilakukan.

Jika digambarkan, dapat berupa bagan sebagai berikut:



Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah bentuk dari kerjasama antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan program P4GN. Dalam pelaksanaan kerjasama ini tentunya ada komunikasi yang dilakukan oleh kedua lembaga, inilah yang menjadikan kedua lembaga saling memiliki keterkaitan, terutama bagi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat saling bahu membahu dalam melaksanakan program P4GN. Pada dasarnya Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah lembaga yang dibangun oleh masyarakat untuk menjadi wadah dalam organisasi untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kemudian, humas Badan Narkotika Nasional memberikan fasilitas berupa pelatihan dan pembinaan

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

mengenai program P4GN dan diberikanlah izin dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama siswa SMA, karena pada dasarnya, humas Badan Narkotika Nasional memegang kendali penuh atas informasi yang akan disampaikan kepada khalayak banyak.

Dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat, tugas kehumasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menyampaikan infomasi dan mengedukasi dapat terlaksana sampai kepada wilayah kabupaten / kota yang masih awam mengenai informasi seputar narkoba.

Sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah untuk merubah pola pikir masyarakat, dengan demikian pentingnya informasi yang disampaikan untuk dievaluasi terlebih dahulu oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menjadi point penunjang lainnya setelah perubahan dalam masyarakat telihat sebagai bentuk berhasil atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan.

Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga pernah mengatakan bahwa sempat menemukan satu daerah yang tidak paham sama sekali akan bahaya narkoba, dan justru 80 persen dari penduduk daerah itu adalah pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini diakui oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau karena adanya keterbatasan akses lokasi dan juga belum ada pemerintahan yang diperuntukkan di wilayah tersebut.

Berdasarkan dengan temuan inilah, humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga lebih mengutamakan edukasi kepada banyak kalangan termasuk siswa SMA agar tidak mencoba-coba menggunakan narkoba, dan juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menjalankan program P4GN.

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan mewawancarai informan penelitian, peneliti melakukan wawancara untuk menguji validitas data kepada Freddy Simanjuntak (Simanjuntak 2020), beliau mengatakan bahwa untuk komunikasi yang dilakukan antara humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat itu benar menggunakan pola komunikasi yang terintegrasi serta pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkular. Di sisi lain, pola komunikasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga / instansi lainnya lebih kepada secara komunikasi persuasif, informatif, dan pengendalian. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian dalam bentuk informasi yang akan disampaikan kepada khalayak banyak.

Dalam kegiatan sosialisasi, Freddy (Simanjuntak, 2020) mengatakan bahwa pada saat sekarang ini sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka sudah tidak efektif, karena informasi yang disampaikan cenderung majemuk dan itu-itu saja. Terlebih lagi apabila yang menjadi audiens adalah siswa SMA, karena siswa / pelajar pada saat sekarang ini sudah pandai dan lebih banyak menghabiskan waktu berselancar di media sosial. Dengan begitu, sosialisasi yang dilakukan lebih baik menggunakan media sosial, dan tatap muka bisa dilakukan sebagai selingan pada saat sekarang ini mengingat informasi yang disampaikan terkait narkoba ini masih sering diabaikan oleh banyak pihak termasuk siswa SMA.

Berdasarkan dengan pembahasan di atas, dapat peneliti tarik bahwa informasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba masih sangat diperlukan dalam merubah pola pikir masyarakat terkait narkoba. Sosialisasi sangat diperlukan dalam hal ini, namun, bentuk

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

sosialisasi ini masih harus divariasikan lagi agar lebih menarik dan menjangkau berbagai kalangan.

### Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan tidak hanya dengan pertemuan langsung untuk sosialisasi di sekolah, melainkan juga menggunakan media sosial, media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini juga dilakukan menggunakan media sosial whatsapp disamping mengadakan pertemuan langsung dan audiensi. Sosialisasi yang dilakukan oleh humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Lembaga Swadaya Masyarakat ini bertujuan untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat terutama siswa SMA untuk menjauhi naroba dan menanamkan sikap anti terhadap narkoba. Dalam melaksanakan sosialisasi, kedua lembaga memerlukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan kedua lembaga ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau cenderung memegang kendali atas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, pola komunikasi yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menyosialisasikan bahaya narkoba pada siswa SMA menggunakan pola komunikasi primer, sekunder, dan sirkular dengan pola jaringan roda / bintang.

#### Referensi

Arni, Muhammad. 2009. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Aw, Suranto. 2010. Komunikasi Sosial Budaya. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2006. "Sosiologi Komunikasi." Dalam , 2006 ed., 261. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo.

DeVito, J.A. 2007. The Interpersonal Communications Book. USA: Pearson Educations.

Dina Fitriana Lubis. 2020. Interview Sosialisasi Bahaya Narkoba.

- Gischa, Serafica. 2020. "Sosialisasi Pengertian, Proses, Fungsi, Dan Tujuannya." *kompas.com*, 2 Januari 2020. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/140000269/sosialisasi--pengertian-proses-fungsi-dan-tujuannya?page=all.
- Haluan, Redaktur. 2020. "Riau Wilayah Strategis Narkoba." *Haluan Riau*, 27 Januari 2020, Januari 2020 edisi. https://haluanriau.co/2020/01/27/riau-wilayah-strategis-penyebaran-narkotika/.
- Hamali, Arif Yusuf, dan Eka Sari Budihastuti. 2019. *Pemahaman Praktis Administrasi Organisasi dan Manajemen : STrategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Grup. https://books.google.co.id/books?id=k\_CNDwAAQBAJ&pg=PA192&dq=komunikasi+organisasi+devito&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiN6df486PrAhVLXSsKHecoBslQuw UwAHoECAAQBg#onepage&q=komunikasi%organisasi%20devito&f=false.
- Haryono, Akhmad. 2005. Etnografi Komunikasi: Konsep, Metode dan Contoh Penelitian Pola Komunikasi. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. t.t. *Pedoman Umum Komunikasi Organisasi Di Lingkungan Instansi Pemerintahan*.
- Khomsarial, Romli. 2011. Komunikasi Organisasi Lengkap. Jakarta: Grasindo.
- Komunikasi, Pakar. 2019. "Pola Komunikasi Organisasi Yang Baik Jaringan Dan Tipenya." *PakarKomunikasi.com*, 2019. https://pakarkomunikasi.com/pola-komunikasi-organisasi/amp.

Vol. 3 No. 1, Maret 2021: Hal 01-16

- Lailah, Nur R. 2013. "Jaringan Komunikasi." *Chocolate*, 23 April 2013. http://nengnurlailah.blogspot.com/2013/04/jaringan-komunikasi.html.
- Lumentut, Gracia Febrina, Julia T. Pantow, dan Grace J. Waleleng. 2017. "Pola Komunikasi Pemimpin Organisasi Dalam Meningkatkan Moivasi Kerja Anggota LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Inovasi Unsrat." *e-journal* VI. No. 1. Tahun 2017.
- Nizarlin dan Fachrurrazi. 2016. "Gerakan Kolektif Masyarakat Melawan Mafia Narkoba Di Ujoeng Pacu, Kota Lhokseumawe, Aceh." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V* II (gerakan sosial dan kebangkitan bangsa): 1728.
- Online, KBBI. t.t. "Sosialisasi." *Kemendikbud RI*. Diakses 18 April 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi.
- Onong Uchjana effendy. 2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pratiwi, Elisa Indri. 2018. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 1.
- Sefianus Zei. 2020. Interview dengan ketua LAN.
- Setiono, Budi. 2003. "Pengawasan Pemilu Oleh LSM." Suara Merdeka, 2003, oktober 2003 edisi.
- Simanjuntak, Freddy. 2020. cross check jawaban informan penelitian.
- Somba, Maria Magdalena, Desie M. D Warouw, dan Nicholas Mandey. 2017. "Pola Komunikasi Balai Bahasa Dalam Upaya Menyosialisasikan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional Kepada Masyarakat (Studi Balai Bahasa Sulawesi Utara)." *e-journal "Acta Diurna"* VI. No. 1 Tahun 2017.
- Sugandha, Dann. 1996. *Organisasi, Komunikasi, dan Teknik Memberi Perintah*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Suwendra, Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bali: Nilacakra.
- Tri Jata Ayu Pramesti. t.t. Dasar Hukum Pendirian Organisasi di Bidang Sosial.
- Waluya, Waluya. 2014. "Menjadi Pekerja Humas Yang Profesional." *Kompasiana*, 2014. https://www.kompasiana.com/waluya.2014/54f6ede0a3331126438b47de/menjadipekerja-humas-yang-profesional.
- Wayne, R., pace, dan Don F. Faules. 2006. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offiset.
- Widjaja, H. A. W. 2000. *Ilmu komunikasi pengantar studi*. Jakarta: Rineka Cipta.